



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Nomor :B- 3584 /FSy/PP.09/10/2023**

**Tentang
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PERIODE OKTOBER 2023
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023/2024
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

- Menimbang : Bahwa untuk menunjang kelancaran pendidikan pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, perlu ditetapkan dosen di lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk membimbing skripsi mahasiswa S-1 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang perubahan STAIN Malang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
4. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2009 tentang Perubahan Nama Universitas Islam Negeri Malang Menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang Menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan.
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PERIODE OKTOBER 2023 SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2023/2024 PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**
- Pertama : Menunjuk dosen sebagaimana terlampir sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa periode Oktober 2023 program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Kedua : Menugaskan kepada dosen sebagaimana terlampir untuk membimbing skripsi mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagaimana terlampir.
- Ketiga : Dalam hal penyempurnaan judul, pembuatan proposal dan penyelesaian skripsi, pembimbing diperkenankan merubah judul skripsi asalkan masih dalam satu tema.
- Keempat : Apabila terjadi ketidaksesuaian bidang keilmuan dan keberatan untuk melaksanakan pembimbingan dimohon untuk mengembalikannya kepada program studi.
- Kelima : Keputusan ini berlaku selama satu semester (6 bulan) sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dengan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 31 Oktober 2023

Sudirman

Tembusan Kepada Yth:

1. Para Ketua Program Studi;
2. Kepala Bagian Tata Usaha;

Nomor : B- 3584 /FSy/PP.09/10/2023
 Tanggal : 31 Oktober 2023
 Tentang : Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Periode Oktober 2023 Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

NO	NIM	NAMA	JUDUL YANG DIAJUKAN	USULAN DOSEN PEMBIMBING
1	'200203110035	MUHAMMAD AMIR MAHMUD	KONSTITUSIONALITAS HAK PINDAH PILIH PADA PEMILU SERENTAK 2024 (Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Kebijakan Pemilihan Umum Daerah Kota Malang)	Prof . Dr. H. SAIFULLAH, SH., M.Hum.
2	200203110037	SYAFAATUR RAHMAH	CONSTITUENT RECALL ANGGOTA LEGISLATIF MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK DALAM UPAYA PENEGAKAN ASAS KEDAULATAN RAKYAT DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH	Dr. MUSTAFA LUTFI, S.Pd., SH., M.Hum.
3	200203110041	CHUSNUL MAGHFIRAH	TINJAUAN HUKUM PENGENDALIAN POLUSI UDARA MELALUI UJI EMISI PADA KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021 PERSPEKTIF FIQH BI'AH	Dr. MUSLEH Harry, SH., M.Hum.
4	'200203110095	SHALSABILLA SETIA WARDANI	LEGALITAS IZIN PENGELOLAAN LAHAN PERUSAHAAN UMUM AIR MINUM DAERAH BERDASARKAN PERDA KABUPATEN BLITAR NOMOR 14 TAHUN 2019 DAN PRESPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH	Prof . Dr. H. SAIFULLAH, SH., M.Hum.
5	'200203110044	AHMAD SYAHRUL ILIYIN	KEBIJAKAN HUKUM PENUTUPAN SOCIAL COMMERCE TIKTOK SHOP BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 31 TAHUN 2023 PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH	SHEILA KUSUMA WA, SH., MH.
6	200203110030	NARINA RANI NILAM PRATIWI	DESAIN FORMULASI PENGATURAN SOCIAL COMMERCE DI INDONESIA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI PERBANDINGAN HUKUM MALAYSIA)	YAYUK WHINDARI, SH., MH., LL.M.
7	200203110034	WIDYA DWI NOVITASARI	TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NIET ONTVANKELIJKE (NO) DALAM PERKARA PERALIHAN KEPEMILIKAN TANAH PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH (Studi Putusan Nomor 143/G/2020/Ptun.Sby)	SHEILA KUSUMA WA, SH., MH.
8	'200203110088	SABILILLAH KAMAL PUTRA MUBIN	EFEKTIVITAS PASAL 1 AYAT 19 PKPU NOMOR 10 TAHUN 2023 TERHADAP PENDAFTARAN BAKAL CALON LEGISLATIF PEMILU 2024 DI KOTA BATU PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH	Dr. H. M. AUNUL HAKIM, MH.

9	19230061	ADITYA RIZKI PRATANA	PELAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN BERDASARKAN PERDA KOTA MALANG NO. 09 2021 TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN PERSPEKTIF MUHAMMAD BAQIR ASH SADR (Studi Kasus Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun Kota Malang	PRAYUDI RAHMATULLAH, M.HI.
10	18230069	ZAFARURRIFQON AYUBI	POLITIK HUKUM PENAMBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF SAAD AL-DZARI'AH	ABDUL KADIR, S.HI., MH.
11	200203110103	SANDY LAILA MAGHFIROH	REBRANDING DESA WISATA DAN BUDAYA SENDANGDUWUR DALAM UPAYA OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH BERDASARKAN PERDA KABUPATEN LAMONGAN PASAL 22 NOMOR 17 TAHUN 2029	TEGUH SETYOBUDI, S.HI., MH.
12	'200203110012	YUDISTIRA ABDI RIZKI	PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TERHADAP UJI MATERIAL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH	Dr. H. M AUNUL HAKIM, MH
13	200203110029	FARHAN MAULANA RAHMADANI	ANALISIS PELANGGARAN PETUGAS PANTARLIH TERHADAP DPT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU 2024 DI KOTA MALANG (Studi Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 24 Tahun 2018)	Dr. MUSLEH HARRY, SH., M.Hum.
14	200203110032	AHMAD FAJAR	PENETAPAN WILAYAH USAHA PERTAMBANG TIMAH BERDASARKAN PRINSIP INTERGENERATIONAL EQUITY MENURUT PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL PERSPEKTIF FIQH AL-BI'AH	Prof. Dr. H. SAIFULLAH, SH., M.Hum.
15	'200203110061	BAHARUDDIN YUSUF HABIBIE CHOIR	IMPLENTASI KEPUTUSAN KPU NOMOR 403 TAHUN 2023 TERHADAP VERIFIKASI ADMINISTRASI STUDI KPU KOTA BATU, PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH	KHAIRUL UMAM, M.HI.
16	19230053	MUHAMMAD JAUHAR ARIFUL HADI	TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP UPAYA HUKUM KASASI PADA PUTUSAN BEBAS DARI SEGALA TUNTUAN HUKUM (VRIJSPRAAK) BAGI PENYALAHGUNAAN LINGKUNGAN HIDUP	Dra. JUNDIANI, SH., M.Hum.

17	200203110119	ALFINA QOIRIYAH	REKAYASA POLITIK PEMILIHAN CALON KEPALA DESA TUNGGAL BERDASARKAN UU NO 6 TAHUN 2014 PRESPEKTIF SADD AL- DZARI'AH (Study Kasus di Desa Leran Kulon Kecamatan Palang Kabupaten Tuban)	TEGUH SETYOBUDI, S.HI., MH
18	17230050	ULYA WAHIDATUN NISA'	PENGAWASAN AIR LIMBAH LAUNDRY MENURUT PERDA KOTA MALANG NO 3 TAHUN 2017 DAN PERSPEKTIF FIKIH LINGKUNGAN	Dra. JUNDIANI, SH., M.Hum.
19	200203110060	SVITLANA ARINA WIDIATARI	PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KETIDAKPATUHAN PENYELENGGARA RUMAH KOS BERDASARKAN PASAL 8 PERDA KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 4 TAHUN 2022 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH	NUR JANNANI, S.HI., MH
20	200203110058	ULFATUL WIDAD	UPAYA PEMERINTAH DALAM MENGATASI PERUBAHAN IKLIM PADA SUHU PANAS TERHADAP SEKTOR PERTANIAN MENURUT UU NOMOR 19 TAHUN 2013 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH	Prof. Dr. H. SAIFULLAH, SH., M.Hum.
21	200203110017	PUTRI EMIELDATUN NI'MAH YUNianto	URGENSI PASAL 8 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG SAMPAH DALAM MEWUJUDKAN LINGKUNGAN BERSIH DI JALAN RAYA PERSPEKTIF FIQH LINGKUNGAN	Dra. JUNDIANI, SH., M.Hum.
22	200203110086	AKBAR PURNOMO FAHREZI	PROBLEMATIKA ASAS ERGA OMNES PADA SENGKETA PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH	ABDUL KADIR, S.HI., MH.
23	200203110055	PUTRI MILATUL MUTHMAINI	ANALISIS YURIDIS ATAS KEADILAN PROSES HUKUM KASUS KOPI SIANIDA JESSICA KUMALAWONGSO PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH	Prof. Dr. H. SAIFULLAH, SH., M.Hum.
24	19230111	ROIS FIRDYANSYAH	PROBLEMATIKA KAMPANYE POLITIK DITEMPAT PENDIDIKAN BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2023 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH	ABDUL KADIR, S.HI., MH.
25	19230072	IQBAL ACHMAD MAULANA	ANALISIS PENAMBAHAN NORMA HUKUM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-XX/2022 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH	KHAIRUL UMAM, M.HI

26	19230048	MUHAMMAD FAHMI B.	TINJAUAN YURIDIS SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA TERHADAP KASUS DIVESTASI NEWMONT PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus Putusan MK No.2/SKLN-X/2012)	YAYUK WHINDARI, SH., MH. LL.M.
27	'200203110033	PUTRI DEYGITA AISYAH RAMADHANI	PELAYANAN PENGGUNAAN ANGKUTAN UMUM BEBAS ASAP ROKOK BERDASARKAN PERDA PROBOLINGGO NOMOR 12 TAHUN 2012 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH	Dra. JUNDIANI, SH., M.Hum.
28	19230090	PUTRI INTAN	IMPLEMENTASI PASAL 9 NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP PEMBERIAN HAK MAKANAN LAYAK GIZI BAGI NARAPIDANA (studi lembaga pemasyarakatan kota Malang dan kota Surabaya)	TEGUH SETYOBUDI, S.HI., MH.
29	200203110014	RADHIYAH NUR FATIMAH	PERCEPATAN PROGRAM KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK UNTUK TRANSPORTASI JALAN MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 2019 DAN PERSPEKTIF FIQH LINGKUNGAN	Dr. MUSTAFA LUTFI, S.Pd., SH., MH.
30	200203110093	SAIFUL ANWAR	OPTIMALISASI PERAN BAWASLU KAB. TRENGGALEK DALAM MENINGKATKAN FUNGSI KONTROL BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 9 PERBAWASLU NO.2 TAHUN 2023 TENTANG PENGAWASAN PARTISIPATIF PRESPEKTIF MASLAHAH IMAM AL GHAZALI	Dr. MUSTAFA LUTFI, S.Pd., SH., MH.
31	200203110085	MAULIDA HEPI ANTASANI	POLITIK HUKUM PERAMPASAN ASET TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYA'RIAH	SHEILA KUSUMA WA, SH., MH.
32	200203110092	AHMAD YAZID AFTHON	PERLINDUNGAN KAWASAN WISATA GUNUNG BROMO MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 9 TAHUN 2022 DAN PERSPEKTIF FIKIH BI'AH	Dra. JUNDIANI, SH., M.Hum.
33	200203110054	FAIRUZ SYAH PUTRA WAHYU	TINJAUAN HUKUM PAJAK EMISI KARBON PADA PENGURANGAN POLUSI EMISI KARBON BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN PERPSEKTIF FIQH BI'AH	Prof. Dr. H. SAIFULLAH, SH., M.Hum.
34	200203110023	NUR FATIMAH SARWONO	STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PEMENUHAN AKSESIBILITAS TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILU 2024 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2016 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi di KPU Kota Malang)	Prof. Dr. H. SAIFULLAH, SH., M.Hum.

Ditetapkan di : Malang
 Pada tanggal : 31 Oktober 2023

